



## Project Citizen: Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membina Nasionalisme

Asep Dahliyana<sup>1\*</sup>, Cik Suabuana,

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

Correspondence: E-mail: [asep\\_dahly@upi.edu](mailto:asep_dahly@upi.edu)

### ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan mata kuliah yang penting dan strategis dalam mengemban misi membangun kesadaran dan kecakapan generasi muda/mahasiswa agar memiliki jiwa nasionalisme (Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Akan tetapi, praktik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak mendorong kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Hal tersebut disebabkan model pembelajarannya cenderung berbentuk hafalan kognitif sehingga menimbulkan kejenuhan karena materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif, bahkan verbalistik. Dengan memperhatikan masalah tersebut, perlu pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi agar dapat berkontribusi terhadap penguatan nasionalisme mahasiswa. Dalam penelitian ini metode pembelajaran yang digunakan berbasis project citizen yang dikembangkan *Center for Civic Education*. Proses penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan pola *“the dominant-less dominant design”*. Pendekatan kuantitatif menggunakan survei dan pendekatan kualitatif sebagai pendalaman menggunakan wawancara. Populasi penelitian adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melakukan kontrak mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sampel penelitian yaitu mahasiswa Program Studi PGSD A dan C, serta Program Studi Biologi dengan jumlah 108 orang. Hasil penelitian adalah pengaruh pendidikan kewarganegaraan berbasis project citizen terhadap penguatan nasionalisme sebesar 43,6.

### ARTIKEL INFO

**Keywords:**

*Pendidikan kewarganegaraan, Nasionalisme, Project Citizen, Perguruan Tinggi*

## 1. PENDAHULUAN

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata kuliah umum yang wajib di Indonesia. Dengan demikian, PKn memiliki peran yang amat penting dan strategis dalam membentuk “good citizen” yang memiliki kesadaran dan kecakapan untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik, sesuai dengan prinsip *good governance* (Nurdin, 2016: 27). Oleh sebab, pembelajaran mata kuliah umum bukan hanya penguasaan materi pembelajaran belaka, melainkan juga proses internalisasi nilai pada diri peserta pembelajaran (Sunarto & Suhardiyanto, 2013: 85). Dengannya, Pendidikan Kewarganegaraan harus diproyeksikan sebagai subjek pembelajaran pengembangan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab (Budimansyah, 2012: 24). Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan Pendidikan Umum yang menekankan pada aspek afektif (Amri dan Ahmadi, 2010: 39). Akan tetapi, praktik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak mendorong kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Hal tersebut disebabkan, model pembelajarannya cenderung berbentuk hafalan kognitif sehingga menimbulkan kejenuhan karena materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif bahkan verbalistik (Samsuri, 2010: 130).

Keadaan tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan, bahwa praktik pendidikan dalam pembelajaran PKn yang berlangsung di kelas pada saat ini hanyalah sebatas pendidikan yang berorientasi pada pencapaian tujuan kognitif atau pengetahuan saja (Dianti, 2014: 60). Penelitian lain menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi dalam perkuliahan PKn yaitu banyak mahasiswa yang ikut dalam berdiskusi tidak memiliki informasi, ide, pemahaman terhadap topik diskusi (Saputra, 2015: 37). Keadaan tersebut dapat terjadi, sebab metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar dalam hal ini dosen cenderung

monoton dengan hanya ceramah di depan kelas dan diskusi.

Pada masa sekarang ini, PKn tampaknya perlu dilakukan revitalisasi dan reorientasi, baik menyangkut tujuan, misi, kompetensi yang diharapkan, materi, pendekatan dan strategi pembelajarannya. Dengan revitalisasi dan reorientasi ini, diharapkan PKn tidak terjebak lagi menjadi program indoktrinasi politik penguasa. PKn diharapkan lebih mampu menjadi program pendidikan yang secara teoretis, konseptual, dan praksis memiliki konsistensi atau keajegan sebagai pembina warga negara yang baik dan demokratis dengan meminimalisasi pengaruh mandat politik rezim yang berkuasa (Maftuh, 2008: 137). Oleh sebab itu, strategi dan metode pembelajaran PKn harus mendukung penguasaan kompetensi PKn dan pendidikan nilai (Sumardjoko, 2013: 121).

Agar pembelajaran PKn tidak lagi dianggap membosankan, monoton, dan tidak dapat mengembangkan kreativitas mahasiswa, maka metode pembelajaran yang harus dikembangkan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Proses pembelajarannya harus diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui perlibatan sosial (*socio-participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat (Sumardjoko, 2013: 112).
- b. Pengajar PKn harus didorong untuk menggunakan metode mengajar yang lebih demokratis daripada metode yang indoktrinatif (Maftuh, 2008: 140). Pembelajaran PKn yang bermuatan nilai, bermakna, aktif, terpadu, mengundang kemampuan berfikir tingkat tinggi, demokratis, menyenangkan, efektif, efisien, kreatif, melalui belajar dengan bekerja sama (*cooperative learning*), dan mengundang aktivitas sosial (Maftuh, 2008: 143).

- c. Pembelajaran PKn harus dapat membangkitkan kesadaran akan dirinya atas tanggung jawab pribadi dan masyarakat (Sutrisno, 2015: 134).
- d. Pembelajaran PKn harus mampu berkontribusi lahirnya manusia-manusia Indonesia yang mempunyai jiwa dan semangat yang tangguh dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Krisiatari, 2015: 2).
- e. Pembelajaran PKn harus dilaksanakan secara aktif dengan melakukan kegiatan (1) Mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku teks, surat kabar, majalah, tokoh masyarakat, (2) membaca dan menelaah (studi pustaka), (3) mendiskusikan, (4) mempresentasikan, (5) memberi tanggapan, (6) memecahkan masalah atau kasus, (7) mengamati/mengobservasi, (8) mensimulasikan, (9) mendemonstrasikan, dan (1) memberi contoh (Cholisin, 2011: 6-7).
- f. Pembelajaran PKn harus mengembangkan keterampilan akademik dan sosial yang diperlukan agar seseorang dapat mengamalkan nilai-nilai yang dianut sehingga berperilaku konstruktif dan bermoral dalam masyarakat, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi secara jelas, menyimak, bertindak asertif, dan menemukan resolusi konflik (Widyaningsih, Zamroni, Zuchdi. 2014: 84).
- g. Proses pembelajaran harus menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan (Arends, 2007:43).

Kriteria tersebut memberikan gambaran bahwa saat ini dibutuhkan suatu metode pembelajaran pada mata kuliah PKn yang dapat mengembangkan keterampilan mahasiswa secara holistik. Kriteria tersebut tidak berlebihan, sebab bagi bangsa Indonesia la-

hirnya PKn dimaksudkan sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tetap menjaga bangsa ini walaupun terdapat gempuran dari luar tetapi gempuran tersebut tetap ditangkal dengan nilai moral yang ada pada PKn itu sendiri (Kariadi, 2015: 36).

Selain itu, generasi muda mempunyai peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebab itu, kesadaran awal yang harus diketahui bahwa dalam penghayatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air adalah kenyataan bahwa kita telah menjadi bagian tetap dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Disinilah tempat kita lahir, berpijak, hidup, bertumbuh dan berkembang, serta (mungkin saja) kita nanti akan menghembuskan nafas terakhir di tanah air ini. Oleh karenanya, demi membangkitkan kembali semangat nasionalisme generasi muda, Indonesia membutuhkan komitmen untuk meneguhkan semangat persatuan dan kesatuan dengan memegang penuh semboyan negara, yakni "*Bhinneka Tunggal Ika*". Jadi, apabila landasan rasa kebangsaan di waktu yang lampau lebih didasari oleh rasa kebersamaan masa lalu, sekarang dan ke depan rasa kebangsaan harus dilandasi oleh kesamaan pandangan tentang masa depan bersama yang akan kita tuju sebagai "suatu bangsa" (*one of nation*) (Sofyan & Sundawa, 2015: 186).

Dengan memperhatikan uraian di atas, PKn sebagai mata kuliah wajib umum harus dikembalikan tujuannya seperti semula yaitu pada pengembangan dan pembinaan nasionalisme dan patriotisme mahasiswa (Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). PKn sebagai pendidikan nasionalisme, yang berarti melalui PKn diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme, sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa

dan negaranya (Maftuh, 2008: 137). Gelora nasionalisme dipanggil untuk tidak lagi mengurung diri dari batas-batas geopolitik negara bangsa, tetapi berani keluar dari batas-batas itu di mana yang menjadi titik tolak adalah prinsip-prinsip kemanusiaan yang sifatnya universal (Tasa, 2009: 129). Dengan demikian, agar PKn dapat fokus pada pengembangan nasionalisme dan patriotisme mahasiswa, mereka mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya dengan cara berusaha menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (Trianto, 2009:28).

Dengan memperhatikan pemaparan di atas, dengan tuntutan perkembangan keilmuan dan cara berpikir masyarakat, pembelajaran seperti apakah yang layak dikembangkan dan disampaikan untuk skala perguruan tinggi dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan menggapai kehidupan yang penuh persaingan dengan tetap mempertahankan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dengan memperhatikan hal tersebut, penelitian ini akan mencoba mengembangkan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi berbasis project untuk penguatan nasionalisme dan patriotisme mahasiswa.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan kuantitatif yakni melalui metode survey. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan tujuan penelitian untuk mengukur banyak variabel, mengetes hipotesis, dan membuat kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku, pengalaman, atau karakteristik dari suatu fenomena. Penelitian ini pun mengambil sampel dari suatu populasi di Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun sample yang digunakan berjumlah 108 orang yang terdiri dari tiga program studi yakni PGSD A dan C, serta Biologi.

Penelitian ini akan dilakukan terhadap responden utama yakni mahasiswa

yang sedang kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Adapun Program Studi yang dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu PGSD dan Biologi. Hal tersebut didasarkan pada tugas mengajar, di mana kemungkinan untuk melakukan penelitian dan pengembangan model pembelajaran dapat dilakukan di program studi tersebut. Tepatnya Program Studi PGSD kelas A dan C, serta Program Studi Biologi yang masing-masing mahasiswa berjumlah 36 orang. Dengan demikian, jumlah mahasiswa keseluruhan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 108 orang.

Instrumen pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan suatu instrumen pengukuran yang kredibel yang memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Suatu instrumen memenuhi syarat validitas jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara reliabilitas menunjuk pada konsistensi, akurasi, dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran.

Berdasarkan hal itu, mengembangkan instrumen berdasarkan teori pendidikan kewarganegaraan, nasionalisme dan patriotisme. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner skala SSHA (*Survey of Study Habits and Attitudes*) dari Brown dan Holtzman yang sudah diadakan penyesuaian dengan lingkungan budaya Indonesia dengan skala sebagai berikut: 5 = Selalu; 4 = Sering; 3= Kadang-Kadang; 2 = Jarang dan 1 = Tidak Pernah. Hasil pengumpulan data dengan instrumen yang sudah memenuhi syarat validitas reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran yang ideal ini kemudian diolah dan dianalisis. Untuk pertama-tama, analisis dilakukan untuk melihat apakah data memenuhi persyaratan untuk diuji dengan penhujian validitas dan reabilitas, uji korelasi sederhana, uji regresi linear berganda, uji f, dan uji t.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan angket yang didapatkan, dapat digambarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 24 dan

Minitab bahwa tidak terdapat satu datapun yang hilang dari tiap perguruan tinggi sehingga penelitian dapat dilanjutkan ketahapan selanjutnya. Banyaknya responden tiap program studi adalah 36 orang sehingga total responden sebanyak 108 orang dan seluruhnya valid.

Dalam melakukan tes normalitas, pada bagian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu normalitas terhadap Pendidikan Kewarganegaraan, Project Citizen, serta nasionalisme dan patriotisme. Nilai tes normalitas terhadap pendidikan kewarganegaraan diperoleh nilai Sig. pada uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200. Kriteria yang digunakan yaitu terima  $H_0$  apabila nilai Sig. lebih dari tingkatan alpha yang ditentukan. Oleh sebab nilai Sig. = 0,200 > 0,05 maka  $H_0$  diterima. Artinya data Pendidikan Kewarganegaraan dari populasi yang berdistribusi normal. Nilai tes normalitas terhadap project citizen diperoleh nilai Sig. pada uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200. Kriteria yang digunakan yaitu terima  $H_0$  apabila nilai Sig. lebih dari tingkatan alpha yang ditentukan. Oleh sebab nilai Sig. = 0,200 > 0,05 maka  $H_0$  diterima. Artinya data Project Citizen dari populasi yang berdistribusi normal. Sementara tes normalitas untuk nasionalisme dan patriotisme diperoleh nilai Sig. pada uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200. Kriteria yang digunakan yaitu terima  $H_0$  apabila nilai Sig. lebih dari tingkatan alpha yang ditentukan. Oleh sebab, nilai Sig. = 0,200 > 0,05 maka  $H_0$  diterima. Artinya data Nasionalisme dan Patriotisme dari populasi yang berdistribusi normal.

Untuk uji korelasi digunakan perumusan hipotesis

$H_0$  : Pelaksanaan pembelajaran kewarganegaraan berbasis Project tidak berjalan dengan baik

$H_a$  : Pelaksanaan pembelajaran kewarganegaraan berbasis Project berjalan dengan baik dilihat dari hubungannya.

Kriteria Pengujian:

$H_0$  diterima jika Signifikansi > 0,05

$H_0$  ditolak jika Signifikansi < 0,05

**Tabel 1. Correlations**

		PKN	PC
Pendidikan_Kewarganegaraan	Pearson Correlation	1	,431**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	106	106
Project_Citizen	Pearson Correlation	,431**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	106	106

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Oleh sebab nilai Signifikansi (0,000 < 0,05) maka  $H_0$  ditolak, artinya bahwa terdapat hubungan secara signifikan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan project citizen hal ini berarti pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis project berjalan dengan baik. Oleh karena koefisien korelasi nilainya positif, maka berarti Pendidikan Kewarganegaraan berhubungan positif dan signifikan terhadap project citizen.

**Tabel 2. Model Summary**

R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,436	,425	7,183

a. Predictors: (Constant), PC, PKN

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R square sebesar 0,436 atau (43,6%). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan kewarganegaraan berbasis project citizen terhadap penguatan nasionalisme sebesar 43,6 %.

$H_0$  : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara pendidikan kewarganegaraan berbasis project citizen terhadap Nasionalisme

$H_a$  : Ada pengaruh secara signifikan antara pendidikan kewarganegaraan berbasis project citizen terhadap Nasionalisme

Kriteria pengujian

$H_0$  diterima bila F hitung < F tabel

$H_0$  ditolak bila F hitung > F tabel

**Tabel 3. ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regres-sion	4112,71	2	2056,35	39,85	,000 <sup>b</sup>
Residual	5314,84	103	51,60		
Total	9427,55	105			

- a. Dependent Variable: Nasionalisme
- b. Predictors: (Constant), Project\_Citizen, Pendidikan\_Kewarganegaraan

Oleh sebab, F hitung > F tabel (39,852 > 3,082), maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara pendidikan kewarganegaraan berbasis project citizen terhadap nasionalisme.

Menentukan hipotesis

Ho : Secara parsial tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pendidikan kewarganegaraan berbasis Project terhadap Nasionalisme

Ha : Secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan antara pendidikan kewarganegaraan berbasis project terhadap Nasionalisme

Kriteria Pengujian  
 Ho diterima jika -t tabel < t hitung < t tabel  
 Ho ditolak jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel

**Tabel 4. Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	43,006	8,653		4,970	,000
PKn	,569	,104	,450	5,492	,000
PC	,211	,053	,327	3,987	,000

a. Dependent Variable: Nasionalisme  
 Oleh sebab nilai -t hitung > -t tabel (5,492 > 1,983) dan (3,987 > 1,983) maka Ho ditolak, artinya secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan antara pendidikan kewarganegaraan berbasis project terhadap nasionalisme.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, didapatkan R square sebesar 0,436 atau

(43,6%). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan kewarganegaraan berbasis project citizen terhadap penguatan nasionalisme sebesar 43,6 %. Melihat hasil tersebut, berarti penggunaan model project citizen sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa tujuan dari adanya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pengembangan rasa nasionalisme (Penjelasan Pasal 37). Dengan demikian, adanya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat melahirkan kaum akademisi yang mempunyai nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme yang saat kelulusannya kembali hidup menjadi anggota masyarakat dan bekerja tetap mengangkat kecintaannya terhadap tanah air.

Pada tabel 4 dalam perhitungan ANOVA didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pendidikan kewarganegaraan berbasis project citizen terhadap nasionalisme. Hasil tersebut mengindikasikan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan Abudu dan Fuseini pada tahun 2014. *The results depict that the experimental group's level of awareness on their rights as citizens; responsibilities as citizens; democratic values; electoral process; need to engage in community service; principal economic and social policies of the nation; and operation of government is higher compared to that of the control group. The results showed that there is a significant difference between people with citizenship education and those without citizenship education's level of awareness of civic issues. It was also found that there is a significant difference between people with citizenship education and those without citizenship education's desire to take part in community service* (Abudu and Fuseini, 2014: 264). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan akan mempunyai dampak sesuai dengan kebijakan, materi, dan sumber daya yang memberikan pemahaman tentang Kewarganegaraan itu sendiri. Pernyataan ini diperkuat dengan

penelitian di Nigeria menyebutkan bahwa, *the demonstration of civic values and skills is a necessary foundation for a virile nation. Civic education inculcates in the citizens the norms and ideas of democratic and patriotic living. Civic education is the training for equity, justice, responsibility, freedom, patriotism, honesty and obedience to rules and regulations. One of the reasons why Nigeria has not experienced enduring peace and national integration after one hundred years of existence is the little emphasis put on civic education in the country. The teaching of civic education has not been given the right status in the Nigerian school programme. This has had negative effects on the values and civic engagements of the Nigerian citizens* (Falade, at al 2015: 117).

Masalah yang dihadapi Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kekayaan berupa negara kepulauan dengan wilayah yang cukup luas salah satunya adalah disintegrasi. Agar tidak menimbulkan suatu ekses negatif, Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada mahasiswa dengan harapan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. *The concept of a nation actually means and how it relates to this multi-ethnic city-state* (Ortmann, 2009: 25). *Nationalism is a term generally used to describe two phenomena: first, the attitude which members of a nation have when they care about their national identity; and second, the actions that the members of a nation take when seeking to sustain self-determination* (Ubaku, at al. 2014: 55). In the words of Nwabughuogu (2004:4), *nationalism is defined as "strong devotion to one's own country, patriotic feelings, efforts, principles... a consciousness on the part of individuals or groups of membership in a nation, or a desire to forward the strength, liberty or prosperity of a nation"*. Chikendu (2004:48) sees the term as *"...a sentiment and activity directed towards the creation of a nation and the attainment of independent statehood"*.

Dengan memperhatikan hal di atas, lahirilah kebijakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme (Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan (Dye, 2005: 1). Hal tersebut dijadikan menjadi suatu kebijakan, sebab kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Anderson, 1984: 3).

Selain mengembangkan nasionalisme, Pendidikan Kewarganegaraan pun dapat mengembangkan patriotisme. Dengan adanya akar nasionalisme sebagai rasa cinta tanah air, maka disitu pula akan tumbuh sikap patriotisme, rasa kebersamaan, kebebasan, kemanusiaan dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan nasionalisme dibangun oleh kesadaran sejarah, cinta tanah air, dan cita-cita politik.

Dalam hal ini, patriotisme dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) *Value-based patriotism* yang merujuk kepada kesetiaan dan kecintaan seseorang itu terhadap negaranya adalah disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang boleh memberi keuntungan dan kepentingan kepada rakyat seperti pencapaian negara dalam aspek ekonomi dan juga keistimewaan lain yang terdapat di dalam negara tersebut. Oleh itu, negara yang mempunyai ciri-ciri sedemikian memang patut untuk ditaati. Dalam *value-based patriotism* pula memperlihatkan diri mereka seolah-olah tidak ikhlas dalam meletakkan kecintaan dan kesetiaan kepada negara kerana apa yang mereka lakukan adalah berpaksikan kepada kepentingan-kepentingan yang bakal diperoleh daripada negara. (2) *Egocentric patriotism* merujuk kepada kecintaan dan kesetiaan seseorang itu terhadap negaranya semata-mata kerana 'itu adalah negaranya', bukan disebabkan oleh upaya negara itu memberikan pencapaian-pencapaian dan keistimewaan-keistimewaan

tertentu kepada dirinya. Justru, berdasarkan kepada pembahagian ini, dapatlah dinilai bahwa cinta yang sejati kepada negara adalah merujuk kepada *egocentric patriotism*. Individu-individu yang tergolong dalam patriotisme jenis ini akan melakukan apa saja untuk negaranya tanpa mengharap atau imbalan kerana berpegang kepada prinsip 'itu adalah negara mereka (Primoratz, 2002: 443-457).

Sementara di Cina dan di Jepang, semuanya jelas dengan memasukkan pendidikan patriotisme dalam dunia pendidikan. Di Japan, pendirian pangkalan-pangkalan seperti itu telah dipandang dengan penuh kecurigaan. Dalam bahasa Jepang, karakter Cina untuk "dasar" yang digunakan di sini menunjukkan pangkalan militer, sehingga bagi orang Jepang, frasa "Dasar Pendidikan Patriotisme" membangkitkan gambar-gambar dari sebuah gudang militer di mana orang menerima pendidikan patriotik. (Kondo dan Wu, 2011: 27). Sementara, sifat patriotisme sebagai tujuan pendidikan di sekolah-sekolah di Cina telah mengalami transformasi besar selama reformasi ekonomi yang dimulai pada 1978 dan memperoleh momentum pada 1990-an. Khususnya, prinsip yang mendasari patriotisme telah berubah dari sosialisme menjadi nasionalisme (Kondo dan Wu, 2011: 24). Sistem sekolah China memiliki kursus dalam mata pelajaran politik untuk siswa dan siswa pada setiap tahap pendidikan mereka, dari sekolah dasar hingga universitas (Kondo dan Wu, 2011: 24).

Dalam pembicaraan yang dikembangkan oleh Kohn (1944) dari kewarganegaraan Barat berbeda dengan yang dimaksudkan. Berikut penuturannya, "esensi dan bentuk nasionalisme etnic Timur adalah kerangka standar yang digunakan untuk memahami nasionalisme sampai saat ini. Kerangka kerja Kohn yang statis menyatakan bahwa negara-negara Barat adalah warga sipil sejak lahirnya mereka di akhir abad ke delapan belas. Kohn percaya bahwa nasionalisme Barat pada dasarnya berbeda karena ia berkembang bersama dengan hak-hak kewarganegaraan dan karena itu bersifat

sipil (yaitu, demokratis). Karenanya, nasionalisme kewarganegaraan ini lebih disebabkan oleh faktor teritorial daripada faktor etno-kultural dan inklusif dalam arti memungkinkan siapa pun dalam wilayah negara-bangsa untuk menjadi warga negara, tanpa memandang etnis, ras, atau jenis kelamin. Nasionalisme sipil yang berkembang di Kohn's West bersifat individualistis, liberal, rasional, dan kosmopolitan. Bangkitnya nasionalisme di Kohn's West pre diawali dengan pembentukan negara bangsa masa depan, atau... bersamaan dengan itu '(Kohn, 1944: 329-330). Di Timur, sebaliknya, nasionalisme tidak terikat pada kebebasan dan berkembang sebelum pembentukan suatu negara. Studi Kohn tentang nasionalisme telah digunakan sebagai kerangka kerja oleh banyak sarjana di bidang dan hanya dipertanyakan dalam beberapa tahun terakhir (Kuzio dan Kaufmann, 1999:.. Nasionalisme timur didefinisikan oleh sekolah Kohn sebagai berpandangan ke belakang, rawan konflik, suku, irasional dan primitif karena memfokuskan energinya pada membangun identitas nasional baru dan terikat pada agama, bahasa dan nasionalitas. Ini tidak memiliki 'budaya tinggi' dan karenanya berfokus pada isu-isu etnis-budaya (Gellner, 1983; Smith, 1996).

#### 4. CONCLUSION

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, akan sangat berkaitan dengan program yang pemerintah kehendaki. Dalam menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan untuk mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan dengan pertimbangan yang selektif berupa pengembangan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dilakukan baru tataran pengembangan bahan ajar/materi tetapi belum menyentuh aspek perilaku seperti yang dikembangkan Cina dan Jepang. Selain itu, penegasan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi se-

bagai mata kuliah wajib didasari dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 di mana Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus diselenggarakan di setiap perguruan tinggi.

Adapun hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan kewarganegaraan berbasis project citizen terhadap penguatan nasionalisme sebesar 43,6 %. Hal tersebut dapat terjadi sebab, mahasiswa semakin terasah rasa kebangsaannya dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat secara luas. Misalnya dapat dirasakan pada masalah yang diambil oleh Program Studi PGSD A tentang ketahanan pangan.

## REFERENSI

- Abudu, A. M, and Fuseini, M. N. (2014). Civic Awareness and Engagement in Ghana: The Curricular Implication. *European Scientific Journal*. 10 (4), 250-268
- Amri, S. dan Ahmadi, I.K. (2010) *Konstruksi Pengembangan Pembelajaran; Pengaruhnya Terhadap Mekanisme dan Praktik Kurikulum*. Jakarta-Indonesia: PT. Prestasi – Jakarta.
- Anderson, J.E. (1984). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Arends, R. I. (2007). *Learning to Teach Belajar untuk Mengajar*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Budimansyah, D. (2012). *Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Cholisin. (2011). *Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran Pkn*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dianti, P. (2014). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. 23 (1). 58-68
- Dye, T.R. (2005). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Perason Education Inc.
- Falade, Adedayo, D., Adeyami, and Adeniyi, B. (2015). Civic Education in Nigeria's One Hundred Years of Existence: Problem and Prospects. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies*. 6 (1), 113-118.
- Gellner, E. (1983). *Nations and Nationalism*. Ithaca, NY: Cornell University Press. A. D.
- Kariadi, D. (2016). Harmonisasi Nilai Kosmopolitan dan Nasionalisme melalui Pkn untuk Pendidikan Berwawasan Global Berkarakter Lokal. *Jurnal Bina Gogik*. 3 (2). 25-39.
- Kohn, H. (1944). *The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background*. New York: Macmillan,
- Kondo, T, and Wu, X. (2011). A Comparative Study of "Patriotism" as a Goal of School Education in China and Japan. *Journal of Social Science*. 10 (1), 23-32.
- Krisiantari, P. et.al. (2015). Pengaruh Model Pembelajaran Resolusi Konflik terhadap Motivasi Belajar PKn Siswa Kels V Semester Genap Di SD Gugus VIII Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Tahun Pelajaran 2014/2015. *E-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha*. 3 (1). 1-11.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Educationist*. 2 (2). 134-144.
- Nurdin, E.S. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*. 9 (1). 11-30
- Nwabuogu, A.I. (2004). *Problems of Nation Building in Africa*, Okigwe: FASMEN Communications.
- Ortmann, S. (2009). Singapore: The Politics of Inventing National Identity. *Journal of Current Southeast Asian affairs*. 4, 23-46.
- Primoratz, I. (2002). "Patriotism: A deflationary view," *The Philosophical Forum*, Vol. XXXIII, 443-457.
- Samsuri. (2010). "Pembentukan Karakter Warga Negara Demokratis dalam Politik Pendidikan Indonesia Periode Orde Baru Hingga Era Reformasi". *Dalam MGMP PKn Kab.Sleman*. Sleman Press.
- Saputra, E. (2015). Peranan Metode Diskusi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal TINGKAP*. 11 (1). 26-40.
- Smith, A. D. (1996). *Nations and Nationalism in a Global Era*. Cambridge: Polity Press.

- Sofyan, F.S & Sundawa, D. (2015). Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewargangaraan dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. 24 (2). 185-198
- Sumardjoko, B. (2013). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa. *Jurnal Varia Pendidikan*. 25 (2). 110-123.
- Sunarto & Suhardiyanto, A. (2013). Aktualisasi Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Umum (MKU) Di Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. 30 (1). 73-86.
- Sutrisno, E. (2015). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Kesadaran terhadap Hukum Di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Review Pendidikan Islam*. 2 (1). 117-136
- Tasa, M, Ridwan. (2009). *Pemuda dan Nasionalisme Refleksi 101 Tahun Kebangkitan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Trianto. (2009). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif dan Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Ubaku, K.C., Emeh, C.A., Anyikwa, C.N. 2014. Impact of Nationalist Movement on The Actualization of Nigerian Independence, 1914-1960. *International Journal of History and Philosophical Research*. 2 (1), 54-67.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widyaningsih, T.S., Zamroni, dan Zuchdi, D. (2014). Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Karakter pada Siswa SMP dalam Perspektif Fenomenologis (Studi Kasus di SMP 2 Bantul). *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. 2 (2). 181-195.